

# PENERAPAN TATA KELOLA KEUANGAN DI UNIVERSITAS ISLAM BATIK SURAKARTA UNTUK MEWUJUDKAN *GOOD UNIVERSITY GOVERNANCE*

Harsono<sup>1</sup>, Arina Hidayati<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Dosen Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP-UMS

<sup>2</sup>Mahasiswa Pascasarjana FKIP Ekonomi UNS Surakarta

E-mail:

[har152@ums.ac.id](mailto:har152@ums.ac.id), [hidayatiarina93@gmail.com](mailto:hidayatiarina93@gmail.com)

## ABSTRACT

The research aims were: 1) to explore the financial system in Batik Islamic University (UNIBA) Surakarta. 2) To identify the financial managing technique that appropriate with the needs of UNIBA. This was the qualitative research. The data collection was conducted by interviewing several lecturers and staff of UNIBA and observation. The research found the financial managing technique in UNIBA was too simple. Therefore, UNIBA needed the new financial system to encourage the Good University Governance.

**Keywords:** *finance, university, good governance*

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang Masalah

Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, pasal (1) menyebutkan bahwa Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Perguruan tinggi merupakan satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Pedoman yang digunakan untuk menetapkan tujuan pendidikan tinggi adalah Tridharma Perguruan Tinggi. Tridharma Perguruan Tinggi

merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan dalam pendidikan tinggi, yang terdiri dari: menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Tridharma perguruan tinggi adalah salah satu visi dari seluruh perguruan tinggi yang ada di Indonesia ([www.kompasmania.com](http://www.kompasmania.com)). Semua Perguruan Tinggi swasta dan Negeri mempunyai standar pedoman pelaksanaan Tridharma Perguruan tinggi yang sama. Namun, seringkali kita amati kualitas perguruan tinggi yang memasuki peringkat terbaik di Indonesia merupakan perguruan tinggi negeri ([www.ekonomiholic.com](http://www.ekonomiholic.com)).

Permasalahan yang terjadi saat ini pada perguruan tinggi swasta tidak hanya peringkat yang rendah. Namun permasalahan utama yang

berujung pada kualitas daya saing lulusan adalah penurunan kuantitas peminat. Kuantitas mahasiswa yang menurun akan berujung pada permasalahan keuangan dan berakhir pada penutupan PTS (Perguruan Tinggi Swasta) yang bersangkutan (Anwar dan Pratolo: 2012, 6). Pendapat ini diperkuat oleh (Silva: 2000, 50) yang menyatakan bahwa masalah produktivitas tidak hanya terkait dengan output, melainkan juga biaya. Saat ini masyarakat akan memilih pendidikan pada perguruan tinggi tertentu yang mempunyai kualitas dan relevansi kemampuan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Masyarakat cenderung memilih perguruan tinggi bukan dari banyaknya jumlah mahasiswa yang mendaftar, namun lebih melihat pada sisi kualitas lembaga. Silva (2000) menyatakan, untuk menilai kualitas output (lulusan mahasiswa PT) sangat sulit dilakukan. Dengan demikian, masyarakat perlu menggunakan ukuran lain untuk mengetahui perguruan tinggi yang paling tepat dipilih. Menurut (Anwar dan Pratolo: 2012, 7) menyatakan bahwa faktor internal yang mempengaruhi masyarakat memilih perguruan tinggi tertentu adalah terkait dengan sistem manajemen maupun personal yang dimiliki.

Universitas Islam Batik Surakarta merupakan salah satu universitas swasta yang belum banyak menarik masyarakat. Hal ini dibuktikan berdasarkan wawancara dengan beberapa dosen dan staff, hanya satu program studi yang telah mendapat akreditasi A. Sedangkan beberapa program studi lain

berakreditasi B. Permasalahan ini menarik peneliti untuk mengetahui tata kelola yang digunakan pada UNIBA. Peneliti akan melakukan beberapa penelitian dengan mengidentifikasi kebutuhan universitas. Langkah selanjutnya, untuk mewujudkan *good university governance*, peneliti akan mengidentifikasi jenis tata kelola keuangan yang sesuai dengan kebutuhan universitas.

Berdasarkan beberapa masalah di atas, menarik bagi peneliti untuk mengidentifikasi tata kelola keuangan di UNIBA. Hal ini dikarenakan, hasil pengelolaan keuangan yang baik akan berdampak pada keterlaksanaan visi misi perguruan tinggi yang sesuai harapan. Menurut Puxry & Lyall dan Drury (dalam Cropper dan Collin: 1996) hasil survei menyatakan bahwa 93-94% perguruan tinggi melaksanakan sistem penganggaran (pengelolaan keuangan). Hasil survei ini memiliki dasar yang cukup kuat, karena pengelolaan keuangan di instansi pendidikan menjadi komponen yang menjamin terlaksananya proses kegiatan belajar mengajar dalam dunia pendidikan (Leonarti: 2015, 4). Dengan demikian dapat diharapkan, melalui penelitian ini dapat meningkatkan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang optimal akan menghasilkan peserta didik yang dibutuhkan masyarakat.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **Definisi Pengelolaan Keuangan Instansi Pendidikan**

Sebuah studi oleh Finney (dalam Tayib dan Hussain) mendefinisikan proses penganggaran yang baik sebagai salah satu penyedia informasi yang berorientasi pada hasil. Tayib kembali menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik diukur dari keberhasilan sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Zahra dan Maryati (2011: 79) menyatakan bahwa proses pengelolaan keuangan instansi pendidikan (dalam jurnal ini adalah sekolah), mempunyai dua pilar utama dalam kegiatan pengelolaan keuangan yang baik. Dua pilar yang menjadi pedoman dalam pengelolaan keuangan adalah akuntabilitas dan transparansi. Sedangkan pendapat lain disampaikan oleh Leonarti (2015) yang berisi bahwa pembiayaan pendidikan adalah faktor penting dalam menjamin mutu dan kualitas pendidikan.

Undang-undang RI No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 65 (2) menyatakan untuk PTN, tata kelola dan kewenangan pengelolaan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Sedangkan pada Pasal 66 (2) penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi swasta (pengelolaan keuangan dan manajemen perguruan tinggi) diatur berdasarkan statuta PTS yang telah ditetapkan dengan surat keputusan badan penyelenggara. Berdasarkan kajian pustaka di atas, dapat penulis artikan pengelolaan keuangan pada instansi pendidikan adalah suatu sistem yang mencakup semua proses pendanaan dalam pemenuhan kebutuhan instansi pendidikan. Tata kelola manajemen

dan pengelolaan keuangan yang dilakukan pada Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta ini sesuai dengan Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Batik Surakarta. Hal ini dikarenakan UNIBA termasuk golongan universitas swasta.

### **1. *Good University Governance (GUG)***

Konsep penyelenggaraan perguruan tinggi yang saat ini masih banyak menjadi tuntunan adalah konsep *Good University Governance*. Menurut Anwar dan Pratolo (2012: 14) *good governance* mensyaratkan delapan karakteristik umum atau dasar, yakni (1) partisipasi, (2) orientasi pada konsensus, (3) akuntabilitas, (4) transparansi, (5) responsif, (6) efektif dan efisien, (7) ekuiti dan (8) inkluitifitas.

#### **1. Partisipasi**

Partisipasi merupakan kunci dari *good governance*. Partisipasi dapat berbentuk langsung maupun melalui insstitusi perwakilan. Konsep ini mempunyai makna, bahwa perguruan tinggi harus memberikan informatif dan terorganisir. Perguruan tinggi juga dituntut untuk mempunyai kebebasan dalam berasosiasi dan berekspresi dalam menentukan kebijakan, sejauh kebijakan tersebut tidak menyalahi peraturan pemerintah.

#### **2. Rule of law**

*Good governance* memerlukan kerangka legal atau hukum dan peraturan yang ditegakkan secara komprehensif. Artinya, setiap perguruan tinggi yang berdiri harus memenuhi

- peraturan pemerintah dan statuta lembaga pendiri.
3. **Transparansi**  
Selain ada hukum yang mengatur setiap kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi, perlu adanya informasi yang tersedia secara bebas dan dapat diakses langsung oleh masyarakat yang berkepentingan. Transparansi bukan berarti semua jenis informasi dapat dibaca masyarakat luas. Melainkan informasi yang diakses adalah informasi yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat.
  4. **Responsif**  
*Good governance* memerlukan institusi dan proses didalamnya yang mencoba untuk melayani semua *stakeholders* dalam kerangka waktu tertentu yang sesuai.
  5. **Orientasi pada Konsensus**  
Dalam konsep *Good governance* memerlukan pemikiran dari berbagai pihak pengambil keputusan. Artinya, dalam semua kebijakan yang ditetapkan perguruan tinggi hendaknya mengikutsertakan pihak-pihak yang berperan sebagai mediator.
  6. **Ekuiti dan Inkluitifitas**  
Pada konsep ini perguruan tinggi berperan sebagai lembaga yang di dalamnya terdapat beberapa kelompok yang mempunyai kepentingan berbeda satu dengan lain. Untuk meningkatkan dan mempertahankan semua pihak, perlu adanya penetapan tujuan yang sama dalam universitas.
  7. **Efektif dan efisien**  
Setiap kebijakan yang ditetapkan oleh perguruan tinggi hendaknya mempunyai sasaran yang sesuai dengan tujuan dan mempunyai jarak waktu sesuai dengan harapan.
  8. **Akuntabilitas**  
Akuntabilitas dalam konsep *good governance* adalah berkaitan dengan tanggung jawab atas manajemen perguruan tinggi terhadap pihak pemerintah, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2. Metode yang digunakan untuk mengurangi permasalahan di universitas**
- Laporan GAO dalam (Anwar dan Protolo: 2012, 21) menyebutkan beberapa faktor yang berpotensi menghambat kesuksesan *GUG* antara lain:
- a. Terlalu banyak tujuan di organisasi perguruan tinggi yang saling tumpang tindih sehingga sulit untuk mengidentifikasi tujuan strategis organisasi secara tepat
  - b. Terdapat kebijakan/program kerja yang sulit dievaluasi karena memiliki tujuan yang subjektif
  - c. Sistem informasi yang lemah
  - d. Kurang reward bagi para pegawai
  - e. Kurang komitmen manajemen terhadap implementasi sistem tata kelola perguruan tinggi yang baik.
- Massy (dalam Silva: 2000) menyatakan terdapat tiga metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan pengelolaan di lingkup perguruan tinggi. (1) *Specific Responsibility*

(*SpR System*) merupakan sebuah sistem yang mempunyai prinsip bahwa seorang pengelola keuangan harus bisa menentukan pilihan atas pembelanjaan dan pengawasan terhadap implementasi dana. (2) *Price as Regulator* merupakan suatu sistem kontrol keuangan yang mengharuskan pengelola keuangan mampu meminimalisir anggaran belanja melalui proses identifikasi kewenangan dan tugas masing-masing peran di perguruan tinggi yang membutuhkan keperluan tertentu. Artinya, dalam sistem pengelolaan keuangan harus ada pihak yang mengetahui kebutuhan setiap warga di perguruan tinggi, dengan harapan dapat mengoptimalkan output dengan biaya yang rendah. (3) *overall value of outcomes*, pada prinsip ini pengelola keuangan dan sistem tatakelola universitas menyepakati bahwa nilai tanggung jawab pengelolaan keuangan terletak pada hasil yang dicapai. Evaluasi yang dilakukan pada sistem ini mencakup alokasi penganggaran dan pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijakan.

### 3. Kajian Penelitian yang Relevan

- a. Anwar dan Pratolo (2012) menyatakan bahwa pengelolaan dana perguruan tinggi harus diikuti dengan transparansi anggaran secara menyeluruh kepada publik berdasarkan prinsip keadilan, akuntabilitas dan kejujuran seperti yang dijelaskan dalam Pasal 48 UU Sisdiknas No. 20/2003. Akuntabilitas dan transparansi menjadi prinsip dasar yang dapat membawa

sebuah perguruan tinggi menuju *good university governance*. Sistem informasi yang digunakan dalam pengelolaan dana perguruan tinggi harus tepat dan memadai. Hal ini dikarenakan, organisasi dengan kualitas sistem informasi yang lebih baik akan mengimplementasikan sistem tatakelola organisasi secara lebih mudah dibandingkan dengan sistem informasi yang kurang baik. Krumwiede (1998) dalam Cavalluzo dan Ittner (2003).

- b. Tayib dan Hussain (*Good Budgeting Practices in Malaysian Public Universities*) menyimpulkan, bahwa faktor utama yang harus di atasi dalam membuat penganggaran yang baik di Universitas Negeri Malaysia antara lain:

- 1) Pembentukan wewenang, peran dan tanggung jawab yang jelas dari manajemen puncak dan tingkat operasional
- 2) Memperhatikan aspek partisipasi pekerja dalam penetapan tujuan dan proses penyusunan anggaran
- 3) Memperbarui pengetahuan dan ketrampilan pekerja
- 4) Peningkatan kualitas informasi untuk kemungkinan pengambilan keputusan
- 5) Meningkatkan prioritas penggunaan sistem pencatatan keuangan

- secara komputerisasi dibandingkan manual.
- c. Menurut Massy dalam (Tayib dan Hussain) menyatakan bahwa dari tiga metode yang berfungsi untuk memaksimalkan proses pengelolaan keuangan dalam mencapai *good university governance* adalah *overall value of outcomes* (OVR). Hal ini dikarenakan OVR dapat membangun prestasi pada tim pengelola keuangan, karena evaluasi dalam pengelolaan keuangan dinilai dari hasil outcome.

#### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif yang peneliti lakukan, mengumpulkan data melalui empat teknik yaitu: wawancara, observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Teknik analisis data yang dilakukan adalah menyesuaikan metode yang digunakan Sugiyono (2012: 246) yang terdiri dari beberapa langkah, yakni: (1) pengumpulan data, (2) Reduksi Data, (3) Penyajian Data, (4) Penarikan data. Keabsahan data penelitian ini diukur dengan kriteria kreibilitas yang menggunakan konsep triangulasi. Artinya, Penelitian ini mempunyai ukuran kredibilitas karena melakukan teknik pengulangan dalam menentukan data yang dipilih.

#### **HASIL PENELITIAN**

#### **a. Gambaran UNIBA Surakarta**

##### **1) Sejarah UNIBA**

Universitas ini berdiri sejak tahun 1970, pada mulanya Universitas ini berdiri karena gabungan-gabungan dari universitas di Surakarta untuk dijadikan Universitas Sebelas Maret. Namun, karena dua fakultas yang tertinggal yakni fakultas Tarbiyah dan Syari'ah, maka dibentuklah YAPERTIS. Singkat cerita, Yayasan Perguruan Tinggi Islam Surakarta ini memfokuskan untuk mendirikan institusi pendidikan di perguruan tinggi. Kemudian, dibentuklah oleh KH. Ali Atmodjo yayasan perguruan tinggi Islam dengan nama lain Universitas Islam Batik Surakarta.

##### **2) Visi dan Misi UNIBA Surakarta**

Universitas Islam Batik Surakarta ini mempunyai visi misi sebagai berikut:

Visi: Universitas Islam Batik Surakarta menjadi *Entrepreneurial University* yang akhlakul karimah, profesional, berdaya saing global, memiliki komitmen pada risalah Islamiyah di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai rahmatan lil' alamin.

Misi:

- Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan insan wirausaha profesional yang berakhlakul karimah.
  - Mengembangkan penelitian yang berlandaskan iman dan taqwa serta perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Seni budaya (IPTEKS) untuk kemaslahatan umat.
  - Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf kehidupan umat.
- 3) Fakultas Universitas Islam Batik Surakarta ini mempunyai empat fakultas yang terdiri dari:
- a) Fakultas Ekonomi yang mempunyai dua program studi yakni:
    - Akuntansi (S1) Terakreditasi A
    - Manajemen (S2) Terakreditasi B
  - b) Fakultas Hukum, mempunyai program studi:
    - Ilmu Hukum (S1) Terakreditasi B
  - c) Fakultas Pertanian
    - Agroteknologi (S1) Terakreditasi B
- d) Pascasarjana (S2) Manajemen Terakreditasi B
- 4) Tenaga Dosen dan Staff Tenaga dosen tetap yang dimiliki Universitas Islam Batik Surakarta ini sekitar 60 orang dengan status dosen Negeri sebanyak 7, sedangkan staff yang dimiliki kurang lebih 70 orang.
- 5) Mahasiswa Prestasi yang diraih mahasiswa hingga tahun ini berupa penelitian-penelitian mahasiswa yang diprogramkan oleh Dikti yakni Program Kreativitas Mahasiswa (PKM) yang pernah memasuki tahap penelitian nasional. Selain itu prestasi lain yang diraih mahasiswa berupa prestasi non akademik, seperti olahraga catur, atau jenis prestasi non akademik lain.
- 6) Sarana Prasarana Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan di Universitas Islam Batik Surakarta, sarana prasarana yang terdapat di UNIBA sudah cukup memadai. Kelas yang dimiliki sudah mencukupi jumlah program studi yang dibuka, terdapat laboratorium dan perpustakaan sebagai penunjang pembelajaran. Terdapat mushola untuk tempat ibadah dan beberapa kegiatan keislaman di UNIBA. Namun peneliti mengamati bahwa kelas yang terdapat di UNIBA mempunyai diisi oleh jumlah mahasiswa

yang cukup banyak. Dengan demikian, ada kemungkinan terjadi hambatan dalam proses pembelajaran.

#### 7) Rencana Strategis UNIBA

Universitas Islam Batik mempunyai rencana strategis yang dibagi dalam beberapa periode waktu berikut:

##### a) Jangka pendek

Pada beberapa waktu dekat ini, perguruan tinggi UNIBA merencanakan akan membuka program studi baru yang masih dalam rintisan, yakni: Program Teknik Informatika (S1), Prodi Teknik Industri (S1), Prodi Ilmu Komunikasi (S1), Prodi Manajemen Pelayanan Rumah Sakit (D3) dan Program Pascasarjana (S2) Ilmu Hukum.

##### b) Jangka Menengah

UNIBA sedang mempersiapkan sumber daya manusia (tenaga kerja) yang dimiliki mempunyai kompetensi yang sesuai dengan bidang masing-masing.

##### c) Jangka Panjang

Sesuai dengan visi misi perguruan tinggi yang dimiliki, UNIBA mempunyai rencana jangka panjang yakni pengembangan *Entrepreneurial University* melalui kegiatan-kegiatan yang menunjang visi misi tersebut.

#### 8) Sumber dana UNIBA

UNIBA merupakan jenis Perguruan tinggi swasta, dengan demikian pelaksanaan, pengelolaan dan pengawasan dilakukan oleh statuta lembaga penyelenggara universitas. Namun dalam evaluasi, pada periode tertentu, pihak negara juga melakukan penilaian terkait dengan manajemen universitas dan pembiayaan yang dilakukan. Sumber dana UNIBA diperoleh dari: hibah penelitian, dana yayasan, dan biaya pendidikan mahasiswa.

#### 9) Asas Perguruan Tinggi UNIBA

Sesuai dengan bunyi Undang-undang No. 20 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi UNIBA Surakarta berasaskan: (a) Kebenaran ilmiah, (b) Kejujuran, (c) Penalaran, (d) kejujuran, (e) manfaat, (f) kebajikan (g) tanggung jawab, (h) kebhinekaan dan (i) keterjangkauan. Beberapa asas di atas digunakan dalam proses pengendalian manajemen di UNIBA dibuktikan dengan keikutsertaan civitas akademika UNIBA dalam beberapa karya ilmiah, penelitian dan pengabdian masyarakat yang diselenggarakan oleh DIKTI. Kejujuran yang tercermin dalam universitas ini adalah melalui proses penganggaran pendanaan yang dilakukan sesuai dengan kondisi nyata yang dibutuhkan, disertai dengan transparansi kepada rektor maupun pihak lain yang berkepentingan. Asas penalaran diwujudkan dengan adanya beberapa ekstrakurikuler yang dapat melatih tingkat berpikir mahasiswa menjadi lebih terlatih. Asas manfaat menjadi program yang dilakukan UNIBA dengan melakukan kegiatan santunan anak yatim, penanaman pohon, dan kegiatan sosial lain yang memberi manfaat pada banyak pihak. Asas

tanggung jawab dilakukan oleh UNIBA dengan melaporkan semua kegiatan yang telah dilaksanakan kepada Rektor dan yayasan pendidikan batik di Surakarta. UNIBA merupakan universitas yang mempunyai tingkat kejujuran yang tinggi. Sesuai hasil penelitian yang peneliti lakukan, di perguruan tinggi ini tidak menerima sumbangan berupa apapun baik secara pribadi maupun untuk kepentingan universitas.

#### **b. Sistem Pengelolaan Keuangan di UNIBA**

##### 1) Proses pengelolaan keuangan di UNIBA

Proses pengelolaan keuangan di Universitas Islam Batik Surakarta ini dilakukan beberapa tahap berikut:

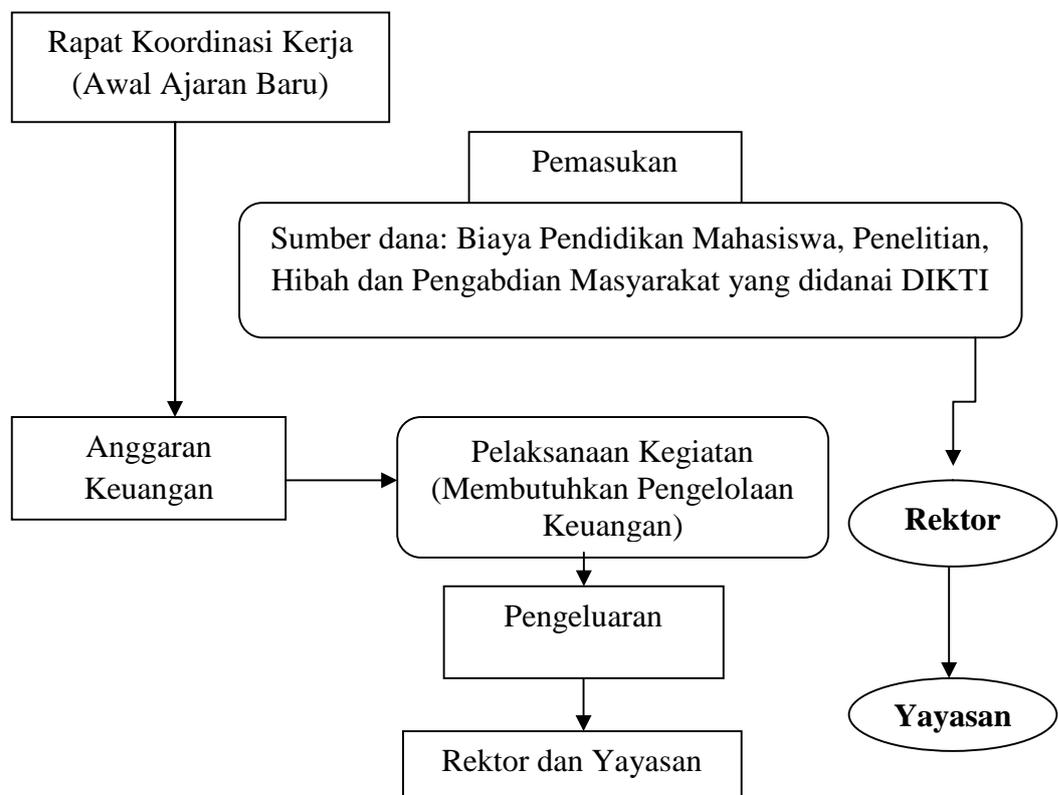
- a) Langkah awal yang dilakukan dalam pengelolaan keuangan adalah dengan membuat rapat yang mempertemukan beberapa pihak berkepentingan (Rektor, Wakil Rektor 1, Wakil Rektor 2, Wakil Rektor 3 dan Wakil Rektor 4, tim pengelola administrasi dan keuangan, dan perwakilan dari Yayasan Pendidikan Islam Batik di Surakarta. Dari hasil rapat tersebut akan muncul perencanaan kegiatan dan kebijakan-kebijakan yang diputuskan, disertai dengan perencanaan biaya yang dibutuhkan.
- b) Selama proses pelaksanaan berlangsung,

apabila terdapat transaksi pemasukan dari luar, maka pengelola keuangan langsung akan melaporkan kepada Rektor untuk dibuatkan bukti kas masuk dan kemudian dilakukan pencatatan.

- c) Apabila suatu kegiatan tertentu membutuhkan dana maka pengelola keuangan wajib membuat proposal untuk mencairkan dana tersebut. Pencairan dana melalui proposal ini diserahkan kepada Rektor kemudian dilanjutkan pada Yayasan Pendidikan Batik di Surakarta.
- d) Pada sistem penganggaran keuangan dalam sebuah pengajuan proposal kegiatan, dilakukan menyesuaikan kebutuhan universitas saat itu. Selain itu, pengajuan dana hanya diperkenankan untuk kegiatan-kegiatan yang menunjang visi misi instansi pendidikan ini. Apabila pengajuan proposal yang berkaitan dengan kegiatan di luar visi misi perguruan tinggi, seringkali dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen melalui penelitian, dan hibah Dikti.
- e) Pada beberapa periode, UNIBA Surakarta akan mendapat kunjungan dari

- instansi pemerintah terkait dengan evaluasi manajemen perguruan tinggi (termasuk pengelolaan keuangan).
- f) Seluruh proses pengalokasian keuangan ini dilakukan dengan kebijakan otonomi perguruan tinggi.

- Artinya, yayasan tidak ikut mengelola keuangan, hanya berfungsi sebagai pengawas.
- g) Sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan instansi adalah menyesuaikan kebutuhan perguruan tinggi saat itu.



**Gambar 1. Konsep Pengelolaan Keuangan UNIBA Surakarta**

2) Sistem Pencatatan Akuntansi Universitas Islam Batik Surakarta ini mempunyai sistem pencatatan akuntansi yang cenderung sederhana. Menurut Mbak Beti selaku pegawai keuangan di perguruan tinggi ini, UNIBA masih menggunakan sistem keuangan pencatatan sederhana yakni arus kas masuk dan keluar. Namun menurut

Kepala Administrasi dan Biro Keuangan UNIBA, pencatatan keuangan ini sudah diinformasikan kepada Rektor, yayasan maupun pemerintah dengan Sistem Informasi Akuntansi yang berbasis komputer. Beberapa kendala dalam pencatatan akuntansi terletak pada tenaga kerja yang dimiliki UNIBA tidak semua berasal dari bidang yang sesuai

dengan tanggung jawab mereka sekarang dalam bekerja. Dengan demikian, menyebabkan UNIBA mengalami hambatan dalam menginformasikan laporan keuangan. Sistem pelaporan yang dilakukan UNIBA bersifat transparan untuk beberapa pihak yang berkepentingan saja, sedangkan wali mahasiswa tidak diberi informasi terkait transparansi keuangan ini. Namun untuk sistem *update* data informasi keuangan yang dilakukan UNIBA sudah dijalankan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan. Hanya saja, informasi tersebut bisa diakses oleh orang-orang berkepentingan, karena informasi yang diberikan belum dapat dijangkau semua pihak (misal menggunakan online, surat edaran alokasi biaya, dan informasi lainnya).

3) Konsep penyelenggaraan perguruan tinggi UNIBA

a) Partisipasi

Konsep partisipasi di UNIBA dilaksanakan secara otonomi oleh perguruan tinggi ini sendiri. Artinya, UNIBA tidak menggunakan perwakilan dalam manajemen perguruan tinggi dan pengelolaan keuangan di dalamnya. Namun terdapat kendala yang peneliti temukan dalam penyampaian informasi di UNIBA belum dilakukan secara informatif. Karena berdasarkan hasil penelitian, UNIBA tidak menyampaikan informasi yang mudah di pahami untuk pihak manapun.

b) Rule of Law

UNIBA mempunyai kerangka legal yang didasarkan pada

statuta perguruan tinggi UNIBA dengan pihak penyelenggara dari Yayasan Pendidikan Islam Batik di Surakarta.

c) Transparansi

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menemukan tingkat transparansi keuangan UNIBA kepada pihak internal (Rektor, Yayasan dan pihak lain dalam perguruan tinggi) cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pendapat Kepala Biro keuangan dan administrasi yang menyatakan setiap kegiatan berakhir akan dimintai pelaporan kepada Rektor, kemudian Rektor akan melaporkan kepada yayasan. Namun untuk transparansi kepada pihak ekstern (wali mahasiswa) belum dilakukan. Hal ini dikarenakan hingga saat ini belum ada wali mahasiswa yang menanyakan pengelolaan keuangan di UNIBA.

d) Tanggung jawab

Aspek tanggung jawab di UNIBA dilakukan dengan pembuatan proposal pada setiap kegiatan yang direncanakan, serta pelaporan pertanggung jawaban setelah kegiatan terlaksana.

e) Orientasi pada konsensus

UNIBA merupakan universitas swasta yang berada di bawah Yayasan Pendidikan Islam Batik Surakarta. Yayasan ini berfungsi sebagai mediator yang menengahi kebutuhan dan keinginan universitas

untuk mengedepankan keuntungan lembaga, namun tetap bermanfaat dan bernilai guna bagi masyarakat. Selain itu, pihak mediator yang mempunyai peranan sama adalah tim evaluasi pendidikan tinggi dari pemerintah. Tim ini mempunyai peranan yang kuat dalam menyelaraskan keinginan perguruan tinggi dengan kebutuhan masyarakat.

- f) Ekuiti dan inklusif  
Pada konsep ini UNIBA berhasil memberikan kepercayaan tersendiri di masyarakat. Hal ini terbukti dengan kualitas dan kuantitas mahasiswa yang semakin meningkat setiap tahunnya.
- g) Efektivitas dan efisiensi  
Apabila dilihat dari segi output yang dimiliki UNIBA sejauh ini belum terlalu nampak dari visi misi universitas. Berdasarkan hasil penelitian, universitas belum menghasilkan lulusan yang mampu berwirausaha sendiri dengan jumlah yang cukup banyak. Dalam hal efisiensi penggunaan sumber daya yang dimiliki pun, UNIBA belum memanfaatkan secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan beberapa pekerjaan yang dilakukan tidak pada ahli di bidang masing-masing.

h) Akuntabilitas

UNIBA melakukan pertanggung jawaban secara langsung melalui Yayasan Pendidikan Islam Batik di Surakarta. Selain itu, pertanggung

jawaban lain dilaporkan UNIBA kepada lembaga evaluasi dari pemerintah yang mempunyai acuan penilaian berdasarkan perundangan yang berlaku.

## PEMBAHASAN

- a. Mengidentifikasi sistem pengelolaan keuangan di Universitas Islam Batik (UNIBA) Surakarta.

Berdasarkan hasil penelitian di atas, peneliti dapat mengidentifikasi sistem pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh UNIBA telah kami bahas pada hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, pengelolaan keuangan yang dilakukan sudah cukup optimal, namun masih ada beberapa kendala terkait dengan kemampuan sumber daya yang dimiliki. Sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Anwar dan Protolo (2012) dinyatakan bahwa perguruan tinggi mempunyai peranan sebagai lembaga pendidikan, pengajaran dan inovasi. Wacana lain terkait dengan perguruan tinggi adalah penyelenggaraan *academic excellence* dan manajemen perguruan tinggi termasuk dalam hal pembiayaan (pengelolaan keuangan). Pendapat Anwar & Protolo ini menjadi bukti bahwa pengelolaan keuangan di UNIBA yang belum sempurna ini harus selalu diperbaiki untuk mencapai kualitas perguruan tinggi yang unggul.

Menurut Tayib dan Hussain dalam penelitiannya, mengklasifikasikan pengelolaan

keuangan di universitas dalam beberapa kelompok yakni: (1) Alokasi sumber daya yang dimiliki universitas, (2) Sistem

informasi akuntansi yang digunakan, (3) konsep pengelolaan yang dilaksanakan

Tabel 1. Sistem Pengelolaan Keuangan di UNIBA

No.	Asas Penilaian	Sistem Pengelolaan UNIBA
1.	<p>Alokasi sumber daya yang dimiliki universitas</p> <p>a. Memperhatikan aspek biaya dan manfaat</p> <p>b. Kesesuaian anggaran yang diajukan dengan visi misi universitas</p> <p>c. Sistem evaluasi</p>	<p>a. Sistem pengelolaan keuangan di UNIBA tidak hanya memperhatikan aspek biaya dan manfaat yang diperoleh, namun mengedepankan asas kebutuhan instansi</p> <p>b. UNIBA hanya akan menerima pengajuan anggaran yang mendukung visi misi universitas. Dalam hal ini UNIBA lebih mengedepankan pemenuhan kebutuhan penelitian, program kreatifitas mahasiswa, pelatihan kewirausahaan dll.</p> <p>c. Sistem evaluasi keuangan di bawah langsung dari rektorat, sehingga semua pengajuan dana harus menyertakan proposal kepada Rektor, kemudian dari Rektor diserahkan kepada yayasan.</p>
2.	<p>Sistem Informasi Akuntansi</p> <p>a. Penggunaan sistem komputerisasi</p> <p>b. Pelaporan kegiatan (Pertanggung jawaban)</p> <p>c. Update informasi keuangan</p> <p>d. Transparansi</p>	<p>a. UNIBA menggunakan sistem pencatatan manual dan komputerisasi, namun untuk pelaporan sudah dilakukan dengan komputerisasi.</p> <p>b. Pertanggung jawaban UNIBA dilakukan pada setiap akhir kegiatan.</p> <p>c. Informasi keuangan tidak selalu di update, kecuali ada pembaharuan penganggaran maupun pelaporan keuangan. Namun setiap ada pembaharuan penganggaran tidak selalu di informasikan kepada semua pihak.</p> <p>d. Transparansi yang dilakukan di UNIBA sudah cukup baik. Berdasarkan hasil penelitian,</p>

UNIBA melakukan sistem pelaporan kepada beberapa pihak berkepentingan. Kelemahan sistem transparansi yang dilakukan di UNIBA adalah tidak ada transparansi untuk wali mahasiswa terkait biaya-biaya kebutuhan dan pertanggung jawabannya.

---

<p>3. Pelaku pengelola keuangan: Kesesuaian kompetensi pengelola keuangan dengan bidang yang ditugaskan</p>	<p>Kompetensi yang dimiliki pengelola keuangan di UNIBA belum sesuai dengan tanggung jawab yang dipegang. Hal ini dikarenakan masih ada beberapa pekerja yang mempunyai tugas tidak sesuai keahlian yang dimiliki.</p>
---	--

---

b. Kesesuaian pengelolaan keuangan di UNIBA dengan teori dan peraturan perundangan tentang pengelolaan keuangan di perguruan tinggi.

1) Kesesuaian teori dengan kondisi pengelolaan keuangan di perguruan tinggi

Kondisi pengelolaan keuangan di UNIBA disesuaikan dengan hasil penelitian Tayib dan Hussain belum dapat dikatakan sebagai bentuk penganggaran yang baik, karena pekerja yang dimiliki UNIBA sebagian besar belum sesuai dengan bidang keahlian yang dimiliki (hasil wawancara dengan pegawai keuangan). Selain itu pencatatan keuangan yang masih sangat sederhana yaitu dengan pencatatan kas masuk dan kas keluar menghambat kinerja perguruan tinggi dalam pelaporan keuangan yang

seharusnya pencatatan diklasifikasikan ke dalam posting-posting yang dapat mempermudah proses pencatatan dan pelaporan.

2) Kesesuaian undang-undang dengan kondisi pengelolaan keuangan di perguruan tinggi

Sesuai dengan bunyi Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi Pasal 67 yang berbunyi penyelenggaraan otonomi perguruan tinggi swasta diatur oleh badan penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Tata kelola manajemen dan pengelolaan keuangan UNIBA dilaksanakan sesuai dengan statuta yang dibuat oleh Yayasan Pendidikan Islam Batik Surakarta, namun tidak lepas dari peraturan perundangan yang berlaku.

- c. Metode pengelolaan keuangan yang baik untuk mewujudkan *Good University Governance*.

Berdasarkan penelitian yang diungkapkan Massy dalam (Tayib dan Hussain) mengenai tiga metode yang berfungsi untuk memaksimalkan proses pengelolaan keuangan dalam mencapai *good university governance* untuk UNIBA adalah metode *price as Regulator*. Sistem ini berlaku untuk pengelolaan keuangan di UNIBA yang masih mempunyai kendala yaitu sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi belum sesuai dengan bidang yang ditugaskan. Namun metode untuk memaksimalkan sistem pengelolaan lain seperti *Specific Responsibility (SpR System)* dan *overall value of outcomes* mempunyai peranan yang tidak kalah penting. SpR sistem dapat digunakan UNIBA Surakarta untuk menentukan kebutuhan yang paling penting hingga kebutuhan yang masih jauh dari visi misi perguruan tinggi. Sedangkan metode OVR dapat digunakan perguruan tinggi untuk memaksimalkan pertanggung jawaban dalam pengelolaan keuangan.

## **SIMPULAN DAN SARAN**

### **Simpulan**

Pengelolaan keuangan merupakan suatu sistem manajemen universitas yang tidak bisa dilepaskan dari semua kegiatan yang mendukung visi misi perguruan tinggi. Adapun simpulan yang dapat diambil peneliti terkait dengan sistem

pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Dalam sistem pengelolaan di UNIBA sudah menerapkan asas-asas *Good University Governance (GUG)*. Namun tidak semua asas berperan secara optimal.
- b. Tingkat kesesuaian sistem pengelolaan keuangan di UNIBA dengan teori dan peraturan perundangan yang berlaku sudah sesuai. Namun ada beberapa faktor yang berperan kurang optimal dan mempengaruhi tingkat kesesuaian tersebut. Faktor tersebut adalah pengetahuan dan ketampilan tim pengelola keuangan yang masih perlu pembaharuan. Hal ini dikarenakan tim pengelola keuangan masih banyak yang berasal dari bidang di luar keuangan dan manajemen
- c. Semua metode yang saran oleh Massy dapat digunakan untuk mengoptimalkan pengelolaan keuangan di UNIBA. Namun metode yang paling cocok digunakan adalah *Price as Regulator*.

### **Saran**

Berdasarkan hasil simpulan di atas, masih terdapat kendala dan kekurangan yang perlu diperbaiki dalam memaksimalkan penganggaran keuangan di UNIBA Surakarta. Berikut penulis paparkan beberapa saran yang perlu diperbaiki untuk mencapai

sistem penganggaran keuangan yang optimal:

- a. Perlu pelaporan pertanggung jawaban universitas terkait dana yang direncanakan dan direalisasikan kepada wali mahasiswa
- b. Perlu memperbarui pengetahuan dan ketrampilan pekerja
- c. Meningkatkan prioritas penggunaan sistem pencatatan keuangan secara komputerisasi dibanding manual
- d. Melakukan *update* informasi terkait informasi pelaporan keuangan sebagai bentuk tanggung jawab universitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar dan Protolo. 2012. Penerapan Model Tata Kelola Keuangan Perguruan Tinggi yang Baik untuk Mewujudkan Good University Governance (Studi pada Perguruan Tinggi Muhammadiyah se Indonesia). Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Cropper dan Collin. 1996. Management accounting practices in universities. *Journal of Management Accounting*. 74,2 Page 28.
- Kementrian, Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Pedoman Pemilihan Pengelolaan Keuangan Berprestasi Tahun 2016.
- Leonarti. A. P. 2015. *Pengelolaan Pembiayaan di SMK Muhammadiyah 6 Gemolong Sragen "Publikasi Ilmiah"*. Program Studi Manajemen Pendidikan Program Pasca Sarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Silva. D, M, F, G. 2000. Resource Allocation in universities: a public choice approach. *RAE*. Volume 40 N.4 .
- Tayib dan Hussaen. TT. Good budgeting practices in Malaysian public universities. *Journal of Finance and Management in Public Services*. Volume 3 Number 1.
- Undang-undang Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
- universitymetric.com. 2015. Universitas Terbaik di Dunia. <http://www.universitymetric.com>. Diakses pada 15 juni 2016. Pukul 06.18 WIB.
- Yulianti. P. Tri Dharma Perguruan Tinggi. [www.kompasiana .com/pitriyulianti](http://www.kompasiana.com/pitriyulianti). diakses Pada 13 Juni 2016 Pukul 21.57 WIB